

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Bekasi hingga saat ini belumlah terbebas dari banjir. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat 47 titik banjir (versi Pemkot Bekasi). Banjir sebetulnya bukan hal baru bagi masyarakat Bekasi. Kejadian bencana terbesar terjadi pada 2002, 2007, 2010 dan 2013. Catatan buruk soal bencana banjir menjadi momok bagi siapapun yang menjadi Walikota - Wakil Walikota di Bekasi, dan jika kita membahas mengenai banjir seolah dianggap menjadi hal yang biasa pada musim penghujan, sehingga metode penanganannya pun tentu tidak terlalu signifikan.

Drainase adalah salah satu aspek yang penting dalam menunjang infrastruktur suatu daerah maupun kawasan. Buruknya sistem drainase suatu kawasan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat antara lain; terganggunya aktivitas masyarakat karena adanya genangan, maupun dampak kesehatan bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. Sistem jaringan drainase di suatu kawasan sudah semestinya dirancang untuk menampung debit aliran yang normal, terutama pada saat musim hujan. Artinya kapasitas saluran drainase sudah diperhitungkan untuk dapat menampung debit air yang terjadi sehingga kawasan yang dimaksud tidak mengalami genangan atau banjir. Jika kapasitas sistem saluran drainase menurun dikarenakan oleh berbagai sebab maka debit yang normal sekalipun tidak akan bisa ditampung oleh sistem yang ada. Sedangkan sebab menurunnya kapasitas sistem antara lain, banyak terdapat

endapan seperti tanah dan sampah, terjadi kerusakan fisik sistem jaringan dan adanya bangunan lain di atas sistem jaringan.

Selama ini penatagunaan drainase perkotaan lebih banyak direncanakan dan dikerjakan oleh pemerintah, sehingga pemerintah seringkali disalahkan apabila terjadi genangan yang mengganggu aktivitas masyarakat. Terlepas dari bagusnya teknis perencanaan dan pengerjaannya, seringkali sarana dan prasarana drainase perkotaan yang sudah ada kondisinya cenderung terbengkalai dan tidak dijaga dengan baik oleh masyarakat karena tidak adanya rasa memiliki dan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri.

Kompleksitas permasalahan drainase juga sering berkaitan dengan masalah sosial-ekonomi perkotaan antara lain, laju pertumbuhan penduduk, kemiskinan dan pengembangan kawasan bisnis maupun perumahan yang kurang terkendali seringkali mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan yang semula merupakan daerah pengaman dan daerah resapan air, seperti daerah sempadan sungai, kolam, rawa dan danau sebagai tempat penampungan air sementara, berubah fungsi menjadi area perumahan untuk tempat tinggal dan pusat perdagangan atau supermarket.

Berdasarkan latar belakang di atas ternyata juga dirasakan kelurahan Jatirahayu yang merupakan salah satu kelurahan yang berada di dalam wilayah kecamatan Pondok Melati kota Bekasi Jawa Barat dengan luas 312,425 km², dengan rata-rata elevasi dasar saluran ke permukaan adalah 52 cm. Jumlah penduduk yang terus bertambah pada daerah di sekitar kelurahan tersebut dan terus meningkatnya permintaan hunian murah menarik banyak pihak pengembang

untuk menanamkan modalnya terutama di bidang properti untuk mengembangkan daerah tersebut.



Gambar 1.1 : Peta Lokasi Kelurahan Jatirahayu

Pembangunan perumahan dan pertokoan pada daerah kelurahan Jatirahayu yang cukup padat telah mengurangi area resapan air hujan. Sebagai contoh area persawahan yg seharusnya menjadi area resapan dengan luas 2,3 hektar kini telah dijadikan perumahan Griya Asri TMII, serta situ Rawabogo yang seharusnya dijadikan sebagai kolam retensi (Tandon) area resapan dengan luas 1,6 hektar ini telah dijadikan perumahan Green Lotus. Pada setiap musim hujan air dari kali Bekasi, dan saluran drainase meluap membanjiri rumah-rumah dan jalan disekitar saluran drainase.



Gambar 1.2 : Kondisi situ Rawa bogo sebelum dijadikan perumahan



Gambar 1.3 : Kondisi saluran pada area pemukiman

Sebagai salah satu upaya untuk melindungi permukiman dari daya rusak air sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, maka pembangunan sistem drainase perkotaan ditujukan untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih, sehat dan bebas genangan.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih, sehat dan bebas genangan tersebut, dapat diupayakan melalui pengelolaan sistem Drainase Berbasis Masyarakat yaitu menempatkan dan melibatkan masyarakat sebagai mobilisator, sosialisator dan aktif menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, dalam penanganan saluran drainase sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Visi dan misi program ini selaras dengan semangat UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimana seluruh elemen masyarakat terlibat dan bertanggung jawab sebagai ujung tombak kegiatan dan pengawasan bersama lembaga pemerintah terkait agar dapat lebih aktif berperan serta dalam kegiatan pemeliharaan saluran drainase, penatagunaan sumberdaya air dan lahan, serta upaya pengendalian masalah banjir dan genangan secara berkesinambungan (Buku Panduan Umum DBM, 2014:2).

Peran pemerintah dan masyarakat dalam memelihara saluran drainase sangat penting, kesadaran untuk menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempat sampah, hal semacam itu masih belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat dikarenakan minimnya pengetahuan tentang cara penanganan drainase.

Saluran drainase yang baik adalah salah satu strategi untuk mengendalikan air yang berlebihan dan untuk mencegah dan meminimalisir genangan atau banjir disuatu perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam hal pengelolaan kondisi fisik saluran drainase dan pemeliharannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah masyarakat sudah paham akan tugasnya dalam pemeliharaan saluran drainase?
2. Apakah masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan saluran drainase?
3. Bagaimana penilaian masyarakat terhadap program pemerintah (Drainase Berbasis Masyarakat) dalam pemeliharaan saluran drainase di Kelurahan Jatirahayu?
4. Faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase di kelurahan Jatirahayu?
5. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase?
6. Apakah pemerintah setempat sudah menyediakan layanan untuk menampung aspirasi warga dan fasilitas yang memadai untuk pemeliharaan drainase?

7. Apakah pemerintah setempat sudah menyampaikan dengan jelas apa saja peran masyarakat yang harus di laksanakan dalam pemeliharaan saluran drainase?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase di dalam kelurahan Jatirahayu. Berdasarkan program pemerintah yakni Drainase Berbasis Masyarakat. Pemeliharaan drainase dalam tingkat masyarakat dalam memelihara drainase yang lebih baik, mencakup 3 poin yaitu: penerahan warga, sosialisasi dan monitoring.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase, yaitu mencakup jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan usia.
3. Lokasi penelitian adalah RW yang menjadi daerah rawan banjir diatas 30 cm kala musim penghujan tiba di dalam Kelurahan Jatirahayu yang terletak di Kecamatan Pondok Melati Bekasi Jawa Barat, sedangkan waktu penelitian selama bulan Desember.

1.4 Perumusan Masalah

Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan drainase yang dilaksanakan oleh pemerintah di kelurahan Jatirahayu?

1.5 Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan sistem jaringan drainase dilingkungannya berdasarkan peraturan dan program pemerintah (Drainase Berbasis Masyarakat), dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sistem jaringan drainase yaitu: pendidikan, pekerjaan, dan usia, khususnya pada Kelurahan Jatirahayu Bekasi Jawa Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami lebih lanjut terhadap peranannya dalam pemeliharaan drainase secara baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bermanfaat bagi penulis dalam menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan perawatan drainase.
3. Bermanfaat bagi Program Studi untuk menambah referensi skripsi mengenai sistem drainase yang berbasis partisipasi masyarakat.
4. Bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya sebagai bahan penelitian